

GARIS WAKTU

SETAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

DAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

17 Oktober 2014

Tim Transisi menyerahkan nama-nama calon menteri kabinet Presiden terpilih Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.



27 Oktober 2014

Presiden Joko Widodo melantik Yassona H. Laoly (PDI-P) sebagai Menteri Hukum dan HAM serta melantik Tedjo Edi Purdjianto (Nasdem) sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.



20 November 2015

Presiden Joko Widodo melantik H.MPrasetyo (Nasdem) sebagai Jaksa Agung.



9 Januari 2015

Presiden Joko Widodo serahkan surat pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri ke DPR.



13 Januari 2015

KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan – calon Kapolri - sebagai tersangka dalam kasus korupsi.



19 Januari 2015

Komjen Budi Waseso diangkat menjadi kabareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius.

22 Januari 2015

Komjen Budi Gunawan mengajukan Praperadilan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK



23 Januari 2015

Komisioner KPK Bambang Widjojanto ditangkap penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam dugaan tindak pidana keterangan palsu saat yang bersangkutan menjadi advokat dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin barat.



26 Januari 2015

Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk tidak ada kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum. Dan meminta KPK dan Kepolisian bekerja sama memberantas korupsi.



3 Februari 2015

Komnas HAM merilis *executive summary* dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Bambang Widjojanto.



9 Februari 2015

Polda Sulselbar menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen



16 Februari 2015

Hakim Sarpin memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK.



18 Februari 2015

Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon pengganti.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres pemberhentian Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Ombudsman mengeluarkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan kepolisian dalam proses penangkapan Bambang Widjojanto.



20 Februari 2015

Presiden Joko Widodo lantik Taufikurrahman Ruki, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji sebagai PLT Pimpinan KPK.



24 Maret 2015

Prof. Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi *payment gateway* Kementerian Hukum dan HAM. Penetapan tersangka ini diduga salah satu bentuk kriminalisasi pegiat anti korupsi.



30 Maret 2015

Hakim Sarpin melaporkan dua Komisioner KY ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.



16 April 2015

DPR menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.



17 April 2015

Presiden melantik Komjen badrodin Haiti sebagai Kapolri.



22 April 2015

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melantik Budi Gunawan sebagai Wakapolri.



12 Mei 2015

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan mantan walikota Makassar Ilham Arief Sirajudin. Ini menjadi kekalahan kedua KPK setelah Praperadilan Budi Gunawan.



21 Mei 2015

Presiden Joko Widodo mengumumkan 9 nama Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.



26 Mei 2015

Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Hadi Purnomo. Ini menjadi kekalahan ketiga KPK setelah Praperadilan Budi Gunawan dan Ilham Arief Siradjudin.



19 Juni 2015

Presiden Joko Widodo menolak pembahasan Revisi UU KPK.



9 Juli 2015

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan dan berhasil menangkap 3 Hakim PTUN Medan, seorang Panitera dan seorang pengacara. Ketiga Hakim PTUN Medan diduga menerima suap terkait penanganan gugatan.



14 Juli 2015

KPK menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Hakim PTUN Medan. Penetapan OC Kaligis merupakan hasil pengembangan perkara.



28 Juli 2015

KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya sebagai tersangka kasus dugaan suap hakim PTUN Medan.

17 Agustus 2015

Kemenerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 1.938 Napi korupsi.



1 September 2015

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK menyerahkan 8 nama calon pimpinan hasil seleksi ke Presiden Joko Widodo.



3 September 2015

Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim, digantikan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.



14 September 2015

Presiden Joko Widodo menyerahkan 8 nama calon pimpinan KPK ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan.



18 September 2015

Berkas perkara Komisioner KPK Non Aktif dilimpahkan ke Kejaksaan.



22 September 2015

Berkas perkara Ketua KPK Non Aktif Abraham Samad dilimpahkan ke Kejaksaan.

Napi Korupsi, Gayus Tambunan dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur. Pemandahan dilakukan setelah beredar foto Gayus Tambunan disebuah restoran.



7 Oktober 2015

Enam Fraksi DPR mengusulkan Revisi UU KPK. Enam fraksi tersebut adalah Golkar, PDI-P, PKB, PPP, Nasdem, Hanura.

8 Oktober 2015

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review* IKAHI soal kewenangan KY dalam proses seleksi hakim. MK menyatakan KY tak lagi berwenang dalam proses seleksi hakim karena mengganggu independensi.



13 Oktober 2015

Pemerintah menolak melakukan pembahasan revisi UU KPK dan menunda pembahasan UU KPK hingga masa sidang selanjutnya di DPR.



15 Oktober 2015

KPK menetapkan Sekjen Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus korupsi. Patrice Rio Capella terjerat kasus korupsi yang sebelumnya telah menjerat 3 orang Hakim PTUN, Panitera, OC Kaligis, Gatot Pujo Nugrohodan Istri.

